



# MIMIKA MEMBANGUN

*Eme Neme Yauware*



## Salam Redaksi

Pembaca yang terhormat, Media Bappeda ini kami hadirkan sebagai implementasi dari tanggungjawab kami untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang lengkap dan benar atas berbagai aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Mimika.

Percepatan pembangunan terus dilakukan oleh pemerintah, baik infrastruktur maupun pelayanan publik dan pengembangan sumber daya manusia, serta mental spiritual, secara bersamaan dan sinergis, dengan melibatkan semua unsur dalam pemerintahan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Mimika.

Media ini adalah dokumentasi atas sebagian dari perjalanan pembangunan di Kabupaten Mimika. Kami persembahkan untuk seluruh lapisan masyarakat sebagai salah satu sumber informasi atas kiprah pemerintah yang benar, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk peningkatan kualitas Media ini dan bagi kemajuan pembangunan di Mimika.

Tim Redaksi

### Pengarah

Bupati Mimika

### Penanggungjawab

Kepala Bappeda

### Tim Redaksi

#### Koordinator

Sekretaris Bappeda Mimika

#### Anggota :

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan Ekonomi

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kepala Bidang Pengendalian

Kantor Bappeda Kabupaten Mimika  
Jl. Cendrawasih SP.II, Utikini Baru,  
Kec. Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua. 99963



# Mimika Membangun Edisi Maret

## *Daftar Isi*

- Laporan Utama Hal. 3-7
- Laporan Khusus Hal. 8-26
- Bidang Infrastruktur Hal. 27-32
- Bidang Ekonomi Hal. 33-39
- Bidang Sosial Budaya Hal. 40-47





# Buka Forum Perangkat Daerah Bupati Mimika Tekankan Pembangunan Berkelanjutan



**P**EMERINTAH Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kembali menggelar Forum Perangkat Daerah sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan perencanaan program Tahun 2025.

Forum perangkat daerah yang digelar selama dua hari itu dibuka oleh Bupati Mimika, Dr. Eltinus Omaleng, SEMH

Foto: Bappeda



Forum perangkat daerah yang digelar selama dua hari itu dibuka oleh Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH didampingi Anggota DPRD Mimika, Iwan Anwar dan Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, MSi pada Jumat (22/3/2024).

Bupati Eltinus Omaleng mengatakan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kegiatan ini kata Bupati, merupakan bagian dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Mimika tahun 2025 yang diselaraskan dengan rencana kerja atau renja perangkat daerah dan bermuara pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

“Kegiatan ini diharapkan dapat merumuskan rencana pembangunan Kabupaten Mimika ke depan ke arah yang lebih baik dalam upaya peningkatan



Foto: Bappeda



Foto: Bappeda

kualitas keluaran kegiatan yang lebih baik berdasarkan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat,” kata Bupati.

Forum yang mempertemukan distrik dengan OPD teknis ini diharapkan Bu-

pati dapat menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2025 dengan merespon aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang distrik sebelumnya yang sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan.

Dalam menentukan prioritas pembangunan, Bupati menekankan beberapa hal. Pertama, tahun 2025 merupakan tahun transisi maka dokumen Renja OPD tetap berpedoman pada Renstra OPD yang belum tercapai dan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja





Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2025.

Kedua, mengevaluasi pelaksanaan Renja-OPD tahun lalu berdasarkan renstra-opd termasuk program/kegiatan yang belum terselesaikan dan masih perlu untuk dilanjutkan serta yang ketiga, merumuskan prioritas program dan kegiatan, indikator yang terukur, kelompok sasaran, lokasi dan pagu indikatif dari setiap opd.

“Konsep pembangunan di Papua secara khusus di Kabupaten Mimika didasarkan pada pengertian bahwa pembangunan harus dilakukan secara berkelanjutan dan partisipatif, artinya bahwa semua elemen masyarakat terlibat dalam proses pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal, budaya dan adat istiadat masyarakat setempat,” tegas Bupati Omaleng.

Karena itu sambung Bupati, perlunya keberlanjutan membuka akses dan pengembangan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan sdm, mendorong kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal serta meningkatkan koordinasi antar pihak yang ada di Kabupaten Mimika.(BAPPEDA)



Foto: Bappeda

# Bupati Mimika Eltinus Omaleng Pimpin Rapat OPD

## ● Tegas Terhadap Pengelolaan Anggaran dan Disiplin Pegawai

**B**UPATI Kabupaten Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH memimpin rapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan

disiplin pegawai dalam menjalankan tugasnya. Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka memastikan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD tahun 2024.

Dalam rapat yang dilaksanakan pada 4 Maret 2024 tersebut, Bupati Omaleng menyoroti beberapa hal penting terkait pengelolaan anggaran dan disiplin pegawai.



► **Optimalisasi Anggaran:**

Bupati menegaskan bahwa dana sebesar Rp 7,5 triliun harus dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini mengingat bahwa anggaran yang besar tidak boleh terlambat dalam penggunaannya. “Dana Rp 7,5 triliun harus dihabiskan, jadi harus segera dilelang,” ujar Bupati.

► **Pengelolaan Aset:**

Bupati menyoroti pentingnya pemantauan terhadap aset daerah seperti bangunan dan tanah. Dia menekankan bahwa penataan dan pemeliharaan aset harus dilakukan dengan baik agar nilai dan fungsinya dapat dipertahankan.

► **Penegakan Disiplin Pegawai:**

Bupati menekankan pentingnya disiplin pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dia menyatakan bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) akan memimpin dalam hal ini, dan semua perintah dari Sekda harus dihargai dan dipatuhi oleh seluruh pegawai. “Bupati dan wakil bupati adalah orang politik. Setelah masa jabatan selesai, semua harus mendengarkan Sekda,” tegasnya.

► **Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama:**

Bupati memberikan peluang bagi pegawai eselon 3 untuk mengikuti seleksi terbuka guna menduduki posisi eselon 2. Dia juga menegaskan bahwa seleksi terbuka tidak hanya terbatas pada eselon 2, tetapi juga terbuka bagi pegawai dari berbagai dinas.

► **Penegakan Kedisiplinan:**

Bupati menekankan bahwa segala bentuk pelanggaran disiplin pegawai tidak akan ditoleransi. Dia menegaskan bahwa tindakan keras seperti pemberhentian atau pemecatan akan diambil jika diperlukan. Namun, dia juga menegaskan bahwa sikap kepemimpinan harus disertai dengan kesabaran dan pengertian.

Dengan rapat ini, Bupati Omaleng memberikan arahan yang tegas untuk memastikan efektivitas pengelolaan anggaran dan kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugasnya demi kemajuan Kabupaten Mimika. **(BAPPEDA)**





# Bupati Mimika Buka Sosialisasi Penyusunan LPPD

**C**APAIAN Pemerintah Kabupaten Mimika berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) masih dalam kategori rendah. Untuk itu Bagian Tata Pemerintahan Setda Mimika kembali menggelar Sosialisasi Penyusunan LPPD pada Kamis (22/3/2024) dan dibuka langsung oleh Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH.



Bupati Omaleng dalam sambutannya mengatakan, LPPD merupakan laporan kegiatan yang rutin setiap tahun sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja guna mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Untuk itu Bupati meminta setiap OPD berkomitmen untuk memberi kontribusi positif dalam penyusunan LPPD Kabupaten Mimika sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, sehingga dapat menghasilkan LPPD yang menyajikan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan akurat, valid, yang didukung oleh dokumen pendukung yang memadai.

“OPD yang capaian kinerja indikator kinerja kunci pada LPPD yang masih rendah nilainya, indikator tersebut wajib diprogramkan pada tahun anggaran mendatang karena dengan capaian kinerja yang rendah dapat mempengaruhi penilaian pada hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepala daerah,” tegasnya.

Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri menyatakan kehadiran Bupati Mimika dalam kegiatan sosialisasi menunjukkan komitmen perbaikan laporan. Sebab Kabupaten Mimika sudah menunjukkan tren perubahan dalam perbaikan pelaporan sehingga mengalami kenaikan dalam pencapaian dari sebelumnya 1,8 menjadi 2,4. Kemendagri memberi target, pada pelaporan kali ini bisa meningkat ke angka 3 pada kategori sedang. **(BAPPEDA)**



Foto: Bappeda

# Bupati Mimika Lepas Parade Paskah 2024

## Sebuah Perjalanan Menuju Kemenangan dan Pemulihan

**D**ALAM rangka menyambut perayaan hari raya Paskah tahun 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Mimika (PGGM) menggelar Parade Paskah Oikumene yang megah dan bersemangat. Acara ini menjadi momen penting untuk mengingatkan umat Kristiani akan makna keselamatan dan harapan yang terkandung dalam Paskah.





Parade Paskah, yang diwarnai dengan pawai mobil hias mengelilingi kota Timika, secara resmi dilepas oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng. Ribuan umat dari berbagai gereja di Mimika turut serta dalam parade ini, menunjukkan semangat kebersamaan dan kekristenan yang menyatukan.

Bupati Eltinus Omaleng menekankan pentingnya menghayati makna Paskah sebagai sebuah perjalanan menuju kemenangan. "Paskah adalah waktu bagi umat Kristiani untuk merayakan kemenangan Kristus atas maut dan dosa, serta untuk menebar kebaikan kepada sesama manusia dan lingkung-

an sekitar," kata Bupati

Parade Paskah Oikumene juga menjadi simbol pemulihan bagi Kabupaten Mimika pasca Pemilu yang penuh gejolak dan perbedaan pendapat. Pdt. Donald Salima, Ketua PGGM, menyatakan bahwa melalui perayaan Paskah, diharapkan situasi Kota Timika dan



**Parade Paskah, yang diwarnai dengan pawai mobil hias mengelilingi kota Timika, secara resmi dilepas oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng**

Foto: Bappeda

masyarakat yang sempat disibukkan dengan pesta demokrasi bisa dipulihkan kembali.

“Makna dalam parade Paskah ini adalah momen keselamatan bagi setiap orang. Kami berharap agar situasi di Kabupaten Mimika tetap aman, dan pemuka agama memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedamaian,” ungkapnya.

Parade Paskah mengikuti rute yang dimulai dari depan Kantor Pelayanan Polres Mimika, melalui berbagai jalan





utama, hingga mencapai Gereja Martin Luther Mile 32. Selain Parade Paskah Oikumene, Pemkab Mimika bersama PGGM di Mimika juga akan menggelar pawai obor Paskah dan Ibadah Fajar Paskah, sebagai bagian dari rangkaian perayaan yang melambangkan harapan dan kebangkitan.

Dengan semangat kebersamaan dan kesatuan dalam Parade Paskah, umat Kristiani di Mimika menghadapi masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan akan kemungkinan-kemungkinan baru yang membawa kedamaian dan kemenangan bagi semua. (BAPPEDA)

Parade Paskah, yang diwarnai dengan pawai mobil hias mengelilingi kota Timika

Foto: Bappeda

# 10 Gereja Terima Hibah Senilai Rp 2,8 Miliar

**P**ADA puncak kegiatan parade Paskah Kabupaten Mimika Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Mimika menggelar sebuah momen istimewa dengan memberikan bantuan dana hibah senilai Rp 2,8 miliar kepada 10 gereja di wilayah tersebut.

Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng,

secara simbolis menyerahkan bantuan tersebut kepada para pemimpin gereja yang hadir dalam acara tersebut. Richard Wakum, Kabag Kesra, dalam arahannya, menyatakan harapannya agar dana yang diterima dapat digunakan dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan jemaat.

"Kami berharap agar dana hibah ini dapat digunakan sebaik mungkin dan



dipertanggungjawabkan kembali kepada pemerintah daerah. Kami percaya bahwa penggunaan yang bijak dari dana ini akan memberikan manfaat yang besar bagi komunitas gereja dan masyarakat sekitar,” ujar Richard Wakum.

Sepuluh gereja yang beruntung menerima bantuan dana hibah tersebut antara lain GIDI Jemaat El Roi, GMAHK Jemaat Kerit, GKI Jemaat Kanaan, Kapela Santa Maria Bunda Allah, GKPM, GPSDI Jemaat Ima-

nuel, Gereja KINGMI Jemaat Maranata, GBI Jemaat Efata, Gereja Glory of Christ dan Gereja KINGMI Jemaat Betania Kwamki Narama

Dalam pesan singkatnya kepada para penerima dana hibah, Bupati Eltinus Omaleng menyampaikan harapannya agar dana tersebut dapat digunakan dengan baik untuk meningkatkan pelayanan gereja dan kemuliaan Tuhan.

“Kami berharap bahwa dana hibah ini



**Eltinus Omaleng, secara simbolis menyerahkan bantuan tersebut kepada para pemimpin gereja yang hadir dalam acara tersebut**

Foto: Bappeda



dapat menjadi penyemangat bagi kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh gereja-gereja kami di Mimika. Semoga setiap langkah yang diambil akan

membawa berkat dan kemajuan bagi jemaat dan masyarakat sekitar,” ujar Bupati Eltinus Omaleng.

Dengan pemberian hibah ini, diharap-

kan akan terjadi peningkatan kesejahteraan dan pelayanan yang lebih baik bagi jemaat serta komunitas gereja di Kabupaten Mimika. (BAPPEDA)



**Eltinus Omaleng, secara simbolis menyerahkan bantuan tersebut kepada para pemimpin gereja yang hadir dalam acara tersebut**

Foto: Bappeda

# Musrenbang Mimika Rumuskan 2507 Kegiatan Dengan Pagu Rp 10,3 Triliun

**P**EMERINTAH Daerah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Dari kegiatan yang digelar selama tiga hari mulai Selasa-Kamis (26-28/3/2024) itu menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang

diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 142 program. Terdiri dari program pemerintahan dan pembangunan manusia sebanyak 67 program, program kegiatan ekonomi sebanyak 39 dan program infrastruktur dan kewilayahan sebanyak 26 kegiatan. Dari total 142 program itu terdiri dari 309 kegiatan dan sub kegiatan 2.507 dengan pagu mencapai Rp 10.375.593.117.982.

Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling,



Foto: Bappeda



MSi mengatakan, pagu sebesar Rp 10,3 triliun ini masih akan dirasionalisasi untuk menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da-

erah (RAPBD) Tahun 2025 mendatang. Yohana menjelaskan, dengan rasionalisasi itu maka tentu tidak semua kegiatan yang diusulkan OPD

akan diakomodir. "Rasionalisasi menyesuaikan kapasitas anggaran, kemudian prioritas pembangunan di tahun depan, kemudian melihat





arahan dari pusat terutama untuk pengentasan kemiskinan, stunting dan SPM harus jalan,” jelasnya.

Program ini yang menjadi pemba-

hasan dalam Musrenbang. Bappeda memberikan asistensi, mana yang menjadi urusan wajib maka harus dianggarkan. Program yang menjadi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus dianggarkan sesuai dengan standarnya.

“Karena meskipun SPM mereka



Foto: Bappeda



anggarkan tapi sedikit nah itu nilai kita juga tidak bagus. Karena dihitung dari anggaran sekian persentase untuk hal yang urgen ini berapa, jangan sampai hanya 0,0 sekian,” terangnya.

Sebenarnya kita tidak bisa mengatakan mencoret. Usulan di posisi Rp 10,3 triliun. Kita punya kapasitas keuangan daerah kan tidak sampai segini. Bersyukur kalau sampai 10 triliun. Kalau tidak rasionalisasi menyesuaikan kapasitas anggaran. Kemudian prioritas pembangunan di tahun depan, kemudian melihat arahan dari pusat



terutama untuk pengentasan kemiskinan, stunting dan SPM harus jalan.

Ini yang kita bahas kemarin, asistensi dengan OPD karena kami sudah menyiapkan dokumen itu. Misalnya OPD A mana yang urusan wajib, harus dianggarkan. Kemudian dianggarkan berapa. Karena meskipun SPM mereka anggar tapi sedikit nah itu nilai kita juga tidak bagus. Karena dihitung dari anggaran sekian, persentase untuk hal yang urgen ini berapa, jangan sampai hanya 0,0 sekian. **(BAPPEDA)**



# Ranwal RKPD Mimika Tahun 2025

## Fokus pada Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas Hidup

**B**ADAN Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Konsultasi Publik sebagai tahapan dalam penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2025.

Kegiatan ini dihelat di Hotel Cartenz pada Rabu (20/3) dan dihadiri oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Mimika, perwakilan BUMN, BUMD, serta pemangku kepentingan lainnya.

Penjabat Sekretaris Daerah Mimika, Dr. Ida Wahyuni, dalam sambutannya menjelaskan bahwa forum konsultasi publik ini bertujuan untuk mengumpulkan aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah. RKPD Tahun 2025 ini akan menjadi penjabaran dan masa transisi dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2020 hingga 2024, yang telah ditetapkan di Kabupaten Mimika.

Mengusung tema “Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan ekonomi berbasis potensi lokal dan penguatan daya saing menuju Mimika yang unggul”, RKPD Tahun 2025 menitikberatkan pada penyelenggaraan kelangsungan pemerintah daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Ida Wahyuni, data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia Kabupaten Mimika pada tahun 2023 berada pada poin 75,91. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan daya beli



Penjabat Sekretaris Daerah Mimika, Dr. Ida Wahyuni membuka penggelaran Forum Konsultasi Publik sebagai tahapan dalam penyusunan Ranwal RKPD

Foto: Bappeda



Foto: Bappeda

masyarakat telah berjalan sesuai harapan dan telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mimika.

Fokus pembangunan di Tahun 2025 akan difokuskan pada penurunan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, penanganan inflasi, serta peningkatan indikator kinerja utama lainnya seperti pelayanan publik, kualitas layanan infrastruktur, dan indeks pembangunan masyarakat.

Suharso juga menegaskan bahwa masalah kemiskinan memerlukan perhatian serius. Data dari BPS Provinsi

Papua menunjukkan bahwa presentase kemiskinan di Kabupaten Mimika sebesar 13,55, yang mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menangani masalah kemiskinan dan mengharapkan kerjasama dari semua pihak terkait.

Selain itu, Yoseph Manggasa, Sekretaris Bappeda, menyoroti tingkat pengangguran terbuka yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan bagi semua pihak untuk berkolabo-

rasi dalam menurunkan presentase kemiskinan melalui intervensi kegiatan multi-sektor.

Isu strategis kedepannya adalah kolaborasi antar-OPD dalam menyatukan fokus dalam pembangunan infrastruktur guna meningkatkan ekonomi berbasis potensi lokal dan penguatan daya saing menuju Mimika yang unggul. Semoga pertemuan ini memberikan kontribusi positif untuk penyempurnaan ranwal RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2025, agar dapat mewujudkan visi pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat Mimika. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda

# Pemkab Mimika Buka Seleksi Sekretaris Daerah

**P**EMERINTAH Kabupaten Mimika secara resmi membuka seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya pengumuman oleh Nomor: 01/Pansel-JPTP/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani Ketua Panitia Seleksi,

Anwar Harun Damanik.

Dalam surat pengumuman tersebut mencantumkan sejumlah ketentuan. Salah satunya memberi kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil pada pemerintah daerah Kabupaten Mimika, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Tengah,

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

Seleksi terbuka ini resmi dibuka mulai 13 Maret dan PNS yang berminat diberi kesempatan untuk mengajukan berkas hingga 28 Maret 2024. (**BAP-PEDA**)



**Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika**

Foto: Bappeda

# 10.742 Paket dengan Nilai Rp3,55 Triliun Telah Diinput ke RUP

**B**AGIAN Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika mencatat telah memasukkan 10.742 paket ke dalam sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP). Paket-paket ini memiliki nilai total sekitar Rp3,55 triliun untuk belanja barang dan jasa.

Kepala BPBJ Mimika, Bambang Wiji Wijaksono, menyatakan bahwa hampir 97 persen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mengisi RUP, hanya tersisa satu OPD lagi yang harus melakukannya.

“Jumlah paket tersebut sekitar 10.742

dengan pagu anggaran sekitar Rp3,55 triliun untuk belanja barang dan jasa dengan jumlah paket tersebut,” kata Bambang Wiji Wijaksono di ballroom hotel Cartenz pada Rabu (20/3).

Menurutnya, saat ini pihaknya sedang melakukan peninjauan ulang terhadap paket-paket yang dimasukkan ke dalam RUP.

“Review dilakukan untuk memastikan bahwa paket-paket yang diinput oleh OPD sudah sesuai. Misalnya, jika sebuah paket seharusnya ditenderkan tetapi dimasukkan sebagai non-tender, maka kami akan mereviewnya agar

tidak terjadi kesalahan saat proses tender,” jelasnya.

Bambang juga mengungkapkan bahwa 75 persen dari OPD telah direview oleh BPBJ dan proses tersebut masih berjalan. Tujuan dari review ini adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan atau makna ganda dalam proses tender paket pekerjaan.

“Ideally, kami berharap bahwa kedepannya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menentukan syarat, spesifikasi, dan metode tender dengan jelas, baik untuk pengusaha kecil maupun besar,” tambahnya. **(BAPPEDA)**



Pembangunan infrastruktur jembatan yang sudah dibangun Pemkab Mimika.

Foto: Bappeda

# 18 Distrik di Mimika Kelola Dana Hingga Rp5 Miliar Untuk Padat Karya

**P**EMERINTAH Kabupaten Mimika di tahun 2024 kembali mengalokasikan sejumlah anggaran untuk menjalankan program padat karya di 18 Distrik yang ada di Kabupaten Mimika.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Yohana Paliling mengatakan, di tahun 2024 alokasi anggaran kepada setiap Distrik untuk menjalankan program padat karya bervariasi.

“Untuk 2024 anggaran yang dialokasikan bervariasi yakni Rp3 miliar sampai Rp5 miliar. Nilai 3 miliar itu diberikan untuk Distrik yang bisa kita jangkau sedangkan Distrik di pedalaman anggaran yang dialokasikan sebesar 5 miliar,” kata Yohana, Jumat (22/3/2024).

Alokasi tahun 2024 untuk program padat karya meningkat dibanding alokasi tahun 2023.

“Perubahan anggaran tahun lalu (2023) dialokasikan anggaran dengan nilai 2 miliar kepada masing-masing Distrik untuk menjalankan program padat karya,” terang Yohana.

Mantan Kepala Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mimika itu menerangkan program padat karya hadir untuk memberdayakan masyarakat setempat,

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di setiap kampung.

“Padat karya yang dilakukan dengan swakelola, untuk memberdayakan masyarakat setempat. Padat karya tidak boleh datangkan masyarakat dari luar untuk mengerjakan kegiatan tersebut, tapi harus manfaat masyarakat lokal karena kegiatan yang membutuhkan konsultan atau pihak ketiga itu lain lagi dan itu bukan kegiatan padat karya,” tegas Yohana.



Foto: Bappeda

Jenis kegiatan padat karya seperti pembangunan drainase, membangun jembatan kayu, membuka akses jalan, pemeliharaan balai desa dan lainnya tergantung kebutuhan Distrik yang tidak melibatkan pihak ketiga.

Guna memaksimalkan program tersebut Bappeda memberikan pelatihan khusus bagi pegawai Distrik yang meng-

elola program padat karya.

“Kita sudah lakukan pelatihan dan pendampingan bagi aparat Distrik yang nantinya akan mengelola dana tersebut karena ini uang negara, makanya harus dikelola dengan ketentuan yang berlaku sehingga pengelola harus diberikan pelatihan,” terangnya. (**BAPPEDA**)

# Dinas PUPR Bangun Talud di Lima Daerah Aliran Sungai



**D**ALAM upaya menangani masalah sedimentasi yang sering kali mengakibatkan banjir dan merugikan pemukiman warga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika memprogramkan pembangunan talud di lima titik Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kota Timika.

Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR, Sammy Sahetapy, menjelaskan bahwa proyek pembangunan talud ini akan direalisasikan pada tahun 2024. "Proyek tersebut akan dilaksanakan di Distrik Mimika Baru dan Distrik Wania," ujar Sammy Sahetapy.

Pembangunan talud ini bertujuan untuk mencegah banjir dan mengurangi dampak sedimentasi di sungai-sungai

yang ada di Kota Timika. Namun, Sammy juga mengakui bahwa ada kendala terkait pelebaran sungai karena sejumlah warga telah membangun rumah di sekitar sungai.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Dinas PUPR akan melakukan pengerukan DAS agar kedalaman sungai menjadi optimal dan sampah-sampah yang dibuang secara sembarangan tidak menumpuk di dalam sungai. Meskipun tidak dilakukan pelebaran bibir sungai, langkah ini diharapkan

dapat mengurangi risiko banjir dan melindungi pemukiman warga.

"Terkait proyek ini, saat ini sedang dalam proses lelang tender, dan ada juga pengadaan langsung untuk mempercepat implementasi pembangunan talud di lima DAS," tambah Sammy. (BAPPEDA)



Pembangunan talud di Kamoro Jaya SP 1

Foto: Bappeda

# Infrastruktur dan Peningkatan Ekonomi Jadi Tema Pembangunan Mimika Tahun 2025

**P**EMERINTAH Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) sedang menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2025 yang sudah memasuki tahap konsultasi publik dengan melibatkan lintas sektor.

Adapun tema pembangunan yang diusung Pemkab Mimika pada RKPD Tahun 2025 adalah 'Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dan Penguatan Daya Saing Menuju Mimika Unggul'.

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam konsultasi publik yang digelar Rabu (20/3/2024), empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memaparkan rencana kerja Tahun 2025. Yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang.

Pj Sekda Mimika, Dr Ida Wahyuni, SSTP MSi yang hadir membuka kegiatan mengatakan forum konsultasi publik RKPD merupakan tahapan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025.

RKPD Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dan masa transisi dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2020-2024 Kabupaten Mimika yang akan menjadi

tujuan dan sasaran untuk dapat dicapai di RKPD tahun 2025.

Pj Sekda mengatakan, tema RKPD Tahun 2025 adalah "Pembangunan Infrastruktur Untuk Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Dan Penguatan Daya Saing Menuju Mimika Unggul".

"Saya sangat mengharapkan prioritas pembangunan daerah di Tahun 2025 fokus pada penurunan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim dan penurunan angka stunting dan penanganan





inflasi,” tegas Ida Wahyuni.

Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, MSi dalam arahannya mengatakannya konsep pembangunan harus inklusif, berkelanjutan dan partisipatif. Jadi semua pihak harus terlibat.

Terkait tema dijelaskan Yohana, infrastruktur menjadi penting karena menjadi nadi dalam pembangunan dalam rangka membuka akses. Untuk itu infrastruktur di segala bidang bukan hanya jalan, tapi juga infrastruktur lainnya akan dibangun dan ditingkatkan.

Kepala Dinas PUPR Mimika, Robert Mayaut dalam pemaparannya mengungkapkan Tahun 2025 akan fokus pada pembangunan sistem drainase perkotaan yang fokus di empat distrik yakni Mimika Baru, Kuala Kencana, Kwamki Narama dan Wania.

Pembangunan jalan untuk meningkatkan konektivitas dan akses bagi

masyarakat akan dilakukan di Distrik Mimika Timur, Mimika Baru, Mimika Barat, Iwaka dan Tembagapura. Peningkatan kondisi kemantapan jalan juga akan dilakukan dalam kota, Distrik Agimuga, Iwaka, Kuala Kencana dan Mimika Timur.

Penyediaan air bersih juga menjadi fokus. Dinas PUPR Mimika akan menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk mengubah air payau menjadi air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pesisir Mimika. Sebab wilayah pesisir Mimika tidak bisa menggunakan sumur bor.

Untuk pemenuhan air bersih dalam kota Timika, setelah fasilitas pengolahan air yang dibangun PT Freeport Indonesia sudah diserahkan maka Dinas PUPR telah melakukan uji komisioning. Air kini sudah mengalir dari Kuala Kencana sampai di Bundaran Timika Indah.

Ditargetkan tahun ini 5000 sambungan rumah sudah terpasang dan sebagian masyarakat Kota Timika bisa menikmati air bersih.

Di bidang pendidikan, infrastruktur berupa pembangunan ruang kelas di sekolah mulai dari tingkat TK, SD dan SMP dalam kurun waktu lima tahun sejak 2018-2023, Dinas Pendidikan Mimika telah membangun 500 ruang kelas barudan 92 rumah guru.

Pengembangan ekonomi juga menjadi perhatian Pemkab Mimika. Berdasarkan pemaparan Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah yang menyebutkan bahwa peningkatan APBD Mimika menjadi gambaran pertumbuhan ekonomi di Mimika hingga kini APBD Mimika mencapai Rp 7,5 triliun. Namun itu masih didominasi dari kontribusi PT Freeport Indonesia sebagai penyumbang terbesar. **(BAPPEDA)**



Foto: Bappeda

# Dinas PUPR Bakal Bangun *Sea Wall* di Amar

**D**INAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, berencana membangun sea wall (tembok laut) sebagai langkah preventif untuk mengendalikan abrasi di Distrik Amar.

Menurut Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Mimika, Samy Sahetapy, panjang sea wall yang direncanakan akan dibangun mencapai sekitar 1.000 meter atau 1 kilometer. Pembangunan ini akan dilakukan di tiga kampung di wilayah setempat, yaitu Kampung Amar, Kawar, dan Kampung Manuare.

“Sea wall termasuk program prioritas yang diusulkan melalui Musrenbang, dan Dinas PUPR sudah menganggarkan sekitar Rp 14 miliar untuk pembangunan ini,” ungkap Samy.

Proyek pembangunan sea wall ini menggunakan sistem pemasangan beton silinder yang kemudian akan dicor sebagai pembatas, bertujuan untuk mencegah air laut merusak pemukiman warga di tiga kampung tersebut.

Selain mengatasi abrasi, pembangunan sea wall juga diharapkan dapat mengatasi masalah air tanah yang terkontaminasi saat gelombang pasang di wilayah Amar.

“Kami berharap pembangunan ini dapat mengatasi keluhan warga dan kami akan berupaya agar proyek ini berjalan lancar hingga selesai,” tambah Samy.

Selain di Distrik Amar, sejak tahun 2021 hingga 2022, Dinas PUPR Mimika juga telah fokus membangun sea wall di Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah. Langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap pemukiman warga dan lingkungan sekitar dari dampak buruk abrasi. **(BAPPEDA)**



Foto: Bappeda

# Pemkab Mimika Hadirkan Bus Gratis Untuk Masyarakat

**M**ENJAWAB kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perhubungan bekerjasama dengan DAMRI menyediakan angkutan umum berupa bus yang akan melayani masyarakat tanpa pungutan biaya atau gratis.

Program ini secara resmi diluncurkan, Rabu (27/3/2024) di Kantor Pusat Pemerintahan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Robert Kambu.

Ada enam trayek yang akan dilayani ditambah rute ke Pelabuhan Pomako ketika kapal Pelni berlabuh. Bus gratis ini tersedia karena adanya subsidi dari Pemkab Mimika untuk melayani semua masyarakat di Mimika.

Hadimya angkutan ini dikatakan Robert Kambu, untuk menunjang aktivitas masyarakat dan secara tidak langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik regional maupun nasional, sehingga mempermudah mewujudkan sistem transportasi yang berkelanjutan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan sekitarnya.

Kepala Cabang Damri Timika, Markus Randanan mengatakan layanan ini terlaksana atas kerjasama Pemkab Mimika dengan Damri. Dimana Pemkab Mimika memberikan subsidi sehingga bisa melayani masyarakat dengan gratis. "Ini melayani semua masyarakat baik anak sekolah, masyarakat umum maupun ASN," jelasnya.

Rute untuk angkutan gratis ini sudah ditentukan dan bus akan beroperasi mulai dari pukul 06.30 WIT. Dalam sehari, bus akan beroperasi 8 kali pulang pergi. (BAPPEDA)

## Rute

- **Terminal Pasar Baru - Budi Utomo - Cendrawasih - SP 2 - SP 3 - 32 PP**
- **Terminal Pasar Baru- Hasanuddin- Budi Utomo- Cendrawasih- SP 2- Caritas- Sentra Pendidikan- BKD PP**
- **Terminal Pasar Baru- Budi Utomo- Cendrawasih- Yos Sudarso- Nawaripi-Sp 4 PP**
- **Terminal Pasar Baru- Hasanuddin- Budi Utomo- Cendrawasih-KM 7- SP 1 PP**
- **Terminal Pasar Baru- Hasanuddin- Budi Utomo- Kwamki Narama- Ahmad Yani- C.Heatubun- KPPN- Cendrawasih**
- **Terminal Pasar Baru- Hasanuddin- Budi Utomo- Cendrawasih- Yos Sudarso- Leo Mamiri- Ahmad Yani- Putar Bandara Lama**
- **Timika - Pomako (Disesuaikan jadwal Kapal Pelni)**



# Capaian Kinerja Pemkab Mimika **IPM Meningkatkan dan Kemiskinan Turun**

**P**EMERINTAH Kabupaten Mimika akan menghadapi masa transisi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 2004-2024 ke masa 2025-

2045. Lantas, sejauh mana capaian kinerja Pemkab Mimika.

Sebagaimana dipaparkan Sekretaris Bappeda, Yosef Manggasa dalam kegiatan Konsultasi Publik Rancang-

an Awal RKPD pada Rabu (20/3/2024) bahwa capaian kinerja dapat terlihat dari beberapa indikator.

Seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Yosef mengungkapkan





bahwa, Kabupaten Mimika saat ini berada di peringkat kedua setelah Kota Jayapura. Dimana peningkatan IPM Mimika mengalami pertumbuhan 0,87 persen setiap tahun. Hingga Tahun 2023 IPM Mimika berada pada angka 75,91. Sementara di Tahun 2014 pada awal masa kepemimpinan Bupati Mimika Eltinus Omaleng, IPM masih berada di angka 70,40.

Peningkatan IPM ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan pada urusan pendidikan, kesehatan

dan peningkatan daya beli masyarakat sudah berjalan sesuai yang diharapkan dan telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mimika.

Angka kemiskinan juga menjadi salah satu indikator capaian kinerja. Tingkat kemiskinan di Mimika berdasarkan data Badan Pusat Statistik dikatakan Yosep terus menurun. Pada Tahun 2013 lalu angka kemiskinan di Mimika masih berada di angka 20,37 persen. Namun pada akhir Tahun 2023

turun ke angka 13,55 persen.

“Ini jadi poin kita berkolaborasi bersama dalam menurunkan persentasi kemiskinan lewat intervensi multisektor,” kata Yosef.

Meski demikian, salah satu yang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Mimika adalah tingkat pengangguran terbuka yang pada Tahun 2023 lalu mencapai 7,62 persen. Padahal sebelumnya di tahun 2022 sudah turun ke angka 5,49 persen. (**BAPPEDA**)



Foto: Bappeda

# Lahan Kantor Distrik Kuala Kencana Dibayar Dua Kali

**T**ANAH yang saat ini digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mendirikan kantor Distrik Kuala Kencana di Jalan Cenderawasih SP 3, ternyata telah dibayar dua kali. Hal ini diakui oleh Suharso, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Mimika, saat diwawancarai di ruang kerjanya.

Menurutnya, sebelumnya pihak atas nama Paulus Pinimet telah mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan miliknya. Meskipun telah dibayar sebelumnya, namun hingga saat ini belum ada sertifikat kepemilikan tanah bahkan keterangan terkait ukuran luas tanah tersebut.

Suharso menjelaskan bahwa dalam masa jabatan sebelumnya, tanah tersebut telah dibayar dua kali. Pembayaran pertama dilakukan dengan nilai sekitar Rp400 juta, sementara pem-

bayaran kedua dilakukan oleh bagian Aset Daerah dengan nilai Rp200 juta.

Berdasarkan informasi yang diterima, pembayaran pertama dilakukan saat orang tua dari Paulus Pinimet menggugat. Namun, tidak diketahui ukuran panjang kali lebar dari tanah tersebut. Bukti yang kuat yang dimiliki pemerintah saat ini hanyalah kwitansi-kwitansi.

"Sampai saat ini belum ada sertifikatnya, tapi kita sudah dua kali mediasi di Polres. Kita sudah menyampaikan dan terlihat bahwa dua kali pembayaran, satu kali dibayarkan pada saat pejabat Kristian Karubaba, kemudian kemarin kita pertemuan itu ditemukan juga bahwa sudah pernah aset membayar," ungkapnya.

Ia pun mengimbau kepada seluruh organisasi perangkat daerah maupun jajaran pemerintahan lainnya, apabila membuat kesepakatan pelepasan tanah sebaiknya berkoordinasi dengan

Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika untuk mengetahui status tanah tersebut.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah tanah tersebut sudah dimiliki orang lain atau sebaliknya sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Sementara itu, diketahui sebelumnya pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah atas nama Paulus Pinimet melakukan pemalangan terhadap pembangunan kantor Distrik Kuala Kencana yang tengah dikerjakan. Akibatnya, aktivitas pembangunan kantor terhenti.

Sebagai solusi sementara, jajaran Pemerintahan Distrik Kuala Kencana saat ini menyewa sebuah rumah yang letaknya tidak jauh dari lokasi pembangunan Kantor Distrik Kuala Kencana untuk digunakan sementara guna kelancaran aktivitas pelayanan kepada masyarakat. **(BAPPEDA)**



Kantor Distrik Kuala Kencana

Foto: Bappeda

# Perdana, Pemkab Mimika Lakukan Lelang Aset

**UNTUK** pertama kalinya, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan lelang barang atau aset milik daerah.

Lelang yang digelar Selasa (19/3/2024) itu dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura berdasarkan permohonan dari BPKAD. Proses lelang yang dilakukan secara online melalui aplikasi itu dipimpin langsung oleh Pelelang Ahli Muda KPKNL Jayapura, Irawan Ciputra didampingi Sekretaris BPKAD Mimika, Yandry Sedubun.

Pada lelang perdana ini, Pemkab Mimika melelang aset berupa alat kesehatan dan ambulans bekas milik RSUD Mimika yang sudah rusak dan sudah lama menumpuk di halaman belakang RSUD Mimika.

Setelah dilakukan penilaian dua unit mobil ambulans jenis microbus KIA K2700 itu ditaksir memiliki nilai ekonomis masing-masing Rp 4,9 juta. Meski sudah rusak berat, namun dua kendaraan ini berhasil terjual setelah ditawarkan oleh salah satu peserta lelang.

Begitupun dengan alat kesehatan berupa tempat tidur bekas dan lainnya. Barang yang ditaksir memiliki total nilai Rp 8.745.000 ini diperebutkan oleh tiga peserta lelang. Salah satu peserta bahkan berani menawar dengan harga Rp 14.863.000 sehingga dinyatakan sebagai pemenang lelang.

Pelelang Ahli Muda KPKNL Jayapura, Irawan Ciputra mengatakan uang hasil lelang ini akan disetorkan ke kas Pemda Mimika. Ia menjelaskan bahwa lelang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang



Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Ia mengungkapkan, ini pertama kalinya Pemkab Mimika mengajukan permohonan lelang. "Kalau untuk lelang untuk Kabupaten Mimika ini pertama kali diajukan ke kami. Terkait proses yang sebelumnya seperti apa terus terang kami juga kurang tahu. Kalau pemutihan ada aturannya. Namun mungkin dengan adanya perubahan peraturan pengharusan pemindahtanganan aset mereka harus melalui KPKNL," jelasnya.

Sekretaris BPKAD Mimika, Yandry Sedubun mengatakan, selama ini aset daerah yang rusak diputihkan. Tapi mulai sekarang, aset Pemda baik yang rusak atau masih dalam kondisi baik tapi sudah melewati umur ekonomi harus melalui pelelangan.

"Yang dilelang, itu sesuai aturan itu berusia 7 tahun ke atas. Kondisinya dia mau baik, rusak yang penting

sudah penuh kriteria dan KPKNL nilai bisa dilakukan pelelangan terhadap kendaraan itu, ya sudah bisa dilelang," jelas Yandry.

Setelah lelang perdana ini, BPKAD mulai melakukan inventarisasi terhadap aset yang akan diajukan ke KPKNL untuk dilakukan penilaian. "Data yang ada di BPKAD itu sudah ada beberapa OPD terkait dengan kendaraan roda empat itu yang nanti akan dilakukan pelelangan tapi mekanismenya tetap lewat KPKNL. Jadi tidak ada lagi pemutihan.

Persoalan aset menjadi perhatian Pemkab Mimika terutama kendaraan dinas yang dalam penguasaan PNS yang tidak lagi menjabat. "kemarin di MCP KPK sudah disampaikan bahwa kendaraan dinas yang tidak dikembalikan itu termasuk kategori kerugian negara. Jadi dari KPK sudah tekankan itu," tuturnya. (BAPPEDA)

# Penerimaan Mimika Dari Divestasi Freeport Bisa Mencapai Rp 7 Triliun

**P**ERJUANGAN Pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini Bupati Mimika Eltinus Omaleng untuk mendapatkan 7 persen saham PT Freeport Indonesia akan memberikan manfaat langsung berupa penerimaan bagi daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Mimika, Dwi Cholifah menyebutkan dari divestasi saham tersebut Kabupaten Mimika bisa mendapatkan penerimaan berkisar Rp 3 triliun sampai Rp 7 triliun. Sebab Mimika mendapatkan alokasi 7 persen dari total 10 persen saham un-

tuk Papua. Jadi apabila hasil divestasi ini sudah terealisasi maka APBD Mimika bisa menembus angka Rp 14 triliun.

Hanya saja dikatakan Dwi, proses ini masih tersendat di pusat dalam hal ini Inalum sebagai induk dari PT Freeport





Indonesia. Padahal Pemkab Mimika sudah melaksanakan kewajibannya dengan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bekerjasama dengan Provinsi induk bahkan penyerataan modal juga sudah dilakukan.

Selain dari divestasi, Pemkab Mimika sudah menerima manfaat dari perubahan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berupa 2,5 persen dari keuntungan bersih PT Freeport Indonesia yang nilainya mencapai Rp 1,3 triliun pada Tahun 2023 lalu. Ini merupakan hak dari Pemkab Mimika sebagai daerah penghasil. (BAPPEDA)



Ilustrasi



Foto: Bappeda



# Pemkab Mimika Gelar Safari Ramadan dan Roadshow Paskah

**P**EMERINTAH Kabupaten Mimika kembali mengadakan Safari Ramadan dan Roadshow Paskah yang dimulai di tiga masjid, yaitu Masjid Nurul Hikmah, Masjid Al Haq, dan Masjid Jabal Rahmah Al Banna di Distrik Mimika Timur pada Sabtu (16/3/2024).

Dalam acara Safari Ramadan dan Roadshow Paskah, Pemkab Mimika menyerahkan bantuan sembako kepada pengurus masjid. Bantuan diserahkan oleh Pj Sekda Mimika, Dr Ida Wahyuni, SSTP MSi, mewakili Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH. Turut mendampingi acara ini adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pj Sekda, Ida Wahyuni, menyampaikan salam dari Bupati Mimika kepada seluruh masyarakat di Mimika Timur yang menjalankan ibadah puasa serta umat Nasrani yang merayakan masa prapaskah.

"Pemkab Mimika bersama Forkopimda bertekad untuk mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat dalam rangka bulan suci Ramadan. Kami melakukan pembinaan umat agar Ramadan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat," ujar Pj Sekda.

Selain menyerahkan sembako kepada pengurus masjid, kegiatan ini juga bertujuan untuk berbagi kasih dalam rangka perayaan Paskah.

Tahir Rumagesan, Ketua DKM Masjid Al Haq, menyatakan rasa bangganya karena ini merupakan kunjungan pertama dari Pemkab Mimika dalam 18 tahun sejak masjid didirikan.

"Imamnya orang Papua dan jemaahnya mayoritas orang Papua. Saya bersyukur kepada Pemda, lewat Sekda, atas kunjungan ini. Semoga ini menjadi berkah bagi kita semua," ungkap Tahir Rumagesan.

Semua masyarakat yang hadir merasa sangat gembira dengan kegiatan ini, yang diharapkan menjadi langkah awal dalam memperbaiki kondisi negeri dari hal-hal kecil. Semoga bulan puasa ini membawa berkah bagi semua masyarakat Mimika.

## Pemkab Mimika Sumbang Tiga Masjid di Satuan Pemukiman

Pemerintah Kabupaten Mimika kembali melakukan safari ramadan pada Sabtu (23/3/2024) dengan mengunjungi tiga masjid di Satuan Pemukiman (SP).

Kegiatan yang dipimpin Pj Sekda,

Dr Ida Wahyuni, SSTP MSi itu mengunjungi Masjid Al Istiqlal Kampung Bhintuka SP 13, Masjid At Taubah Kampung Mulia Kencana SP 7 Dan Masjid Al Muhajirin Kampung Naena Muktipura SP 6.

Pada kegiatan safari ramadan yang diikuti para ulama dan pengurus ormas Islam tersebut, Pemkab Mimika menyerahkan bantuan berupa sembako kepada pengurus masjid.

Pj Sekda Mimika, Dr. Ida Wahyuni,



SSTP MSi, menyatakan bahwa kunjungan ini dilakukan dalam rangka memperkuat silaturahmi dengan masyarakat dan tokoh agama, serta para ulama. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga persatuan di Timika,

mendorong toleransi, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Mimika.

“Bantuan sembako yang kami bawa diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kami juga berharap agar pembangunan masjid

dapat berjalan lancar,” ujar Ida Pemerintah juga menyampaikan permohonan maaf kepada masjid-masjid lain yang belum sempat dikunjungi dalam safari ramadan kali ini. (BAPPEDA)



Pj Sekda Mimika, Dr Ida Wahyuni, SSTP Mec Dev bersama Forkopimda mengunjungi beberapa masjid untuk safari ramadan.

Foto: Bappeda

# Tujuh Yayasan dan Panti Asuhan Terima Mobil dari Pemkab Mimika

**P**EMERINTAH Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial telah menyerahkan hibah mobil operasional berupa minibus dan pick-up kepada tujuh yayasan dan panti asuhan di kabupaten tersebut. Penyerahan kendaraan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap anak-anak yang tinggal di yayasan dan panti asuhan tersebut.

Penyerahan mobil operasional tersebut dilakukan di aula Yayasan Peduli Kasih Mimika, khususnya di Panti Asuhan Santa Susana Timika pada Jumat (22/3). Hadir dalam acara tersebut Robert Kambu, Asisten I Setda Mimika, dan Petrus Yumte, Kepala Dinas Sosial Mimika.

Menyampaikan pernyataan dalam kesempatan tersebut, Asisten I Setda Mimika, Robert Kambu, menyatakan bahwa bantuan kendaraan ini adalah wujud konkret dari perhatian pemerintah terhadap anak-anak penghuni yayasan dan panti asuhan, yang dianggap sebagai calon pemimpin masa depan Papua.

"Pemkab Mimika mencoba memperhatikan hal ini kepada anak-anak yang hidup di panti asuhan yang dikelola dengan baik oleh pemiliknya. Saya minta bantuan kendaraan operasional ini dimanfaatkan dengan baik untuk keperluan panti asuhan dan yayasan," ungkap Robert Kambu.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Petrus Yumte, menjelaskan bahwa bantuan kendaraan ini diberikan sesuai dengan standar pengelolaan dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh yayasan dan panti asuhan tersebut.

"Panti asuhan di Mimika sebanyak 19, tetapi benar-benar panti asuhan dan yayasan serta menampung anak-anak



**Bantuan kendaraan operasional dan gedung bagi Panti Asuhan Santa Susana**





hanya 10. Sebagai pemerintah, kami telah mematuhi amanat dan mendekati diri terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satunya anak-anak yatim yang perlu

mendapat uluran tangan dari pemerintah,” jelas Petrus Yumte.

Para pendiri dan pembina panti asuhan yang me-

hibah mobil tersebut juga menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada pemerintah atas bantuan yang diberikan, sambil berharap agar bantuan tersebut dapat terus berlanjut di masa mendatang. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda

# Pemkab Mimika Tegas Bagi ASN Tidak Laporkan LHKPN

**P**EMERINTAH Kabupaten Mimika menegaskan komitmennya dalam transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta menegakkan aturan yang mengatur kewajiban bagi penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan mereka kepada KPK.

Inspektur Pemerintah Kabupaten Mimika, Sihol Parningotan, menegaskan bahwa setiap pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Namun, hingga saat ini, baru 37 dari 186 pejabat yang telah melaporkan LHKPN mereka.

Menurut Sihol, batas akhir pelaporan LHKPN adalah tanggal 31 Maret 2024. Jika pada batas waktu yang telah ditentukan tersebut, pejabat yang bersangkutan masih belum melaporkan LHKPN, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Dalam Peraturan Bupati terbaru tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP), sudah diatur bahwa pejabat yang tidak melaporkan LHKPN hingga batas waktu yang ditentukan tidak akan menerima TPP selamanya,” ungkapnya.

Sihol juga menegaskan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat yang ditandatangani langsung oleh Bupati Mimika kepada pimpinan Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan arahan kepada staf mereka yang wajib melaporkan LHKPN.

“Kami berharap agar pimpinan OPD dan pejabat di lingkup Pemkab Mimika segera melaporkan LHKPN mereka. Pelaporan LHKPN sebenarnya dapat dilakukan dengan cepat, dan kami berharap bisa mencapai 100 persen pelaporan dalam bulan ini,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan komitmennya dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta menegakkan aturan yang mengatur kewajiban bagi penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan mereka kepada KPK. **(BAPPEDA)**



Ilustrasi ASN di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mimika

Foto: Bappeda

# Pemkab Mimika Raih Penghargaan dari Kemenkominfo

**K**EMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan penghargaan kepada 36 mitra komunikasi publik terbaik dalam ajang Anugerah Media Center (AMC) 2024. Mitra komunikasi publik yang dimaksud terdiri dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota,

serta media dan komunitas.

Salah satu penerima penghargaan adalah Pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika. Penghargaan diterima oleh Pj Sekda Mimika, Dr Ida Wahyuni, SSTP MEc Dev yang hadir langsung dalam agenda yang digelar di Bandung pada



**Pj Sekda Mimika, Dr Ida Wahyuni, SSTP MEc Dev menerima penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.**

Foto: Bappeda

Selasa (5/3/2024).

Penghargaan bagi Kabupaten Mimika sebagai kabupaten/kota di Indonesia timur terbaik kontribusi konten audio visual itu diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria serta Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Arief Tri Hardiyanto.

"Saya ingin mengapresiasi peran serta berbagai pihak yang telah bahu membahu membangun komunikasi dan menjaga ruang publik menjadi lebih sehat dan santun. Apresiasi juga untuk gelaran AMC 2024, dan tentu selamat kepada para pemenang.

Semoga memotivasi kita memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan konten yang positif," ujar Wamenkominfo Nezar Patria.

Pj Sekda Mimika, Dr Ida Wahyuni, SSTP MEc Dev menyampaikan ucapan selamat kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Mimika atas kinerjanya dalam penyebarluasan informasi positif terkait pembangunan dan pelayanan pemerintahan di Mimika sehingga bisa mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kominfo.

Bupati Mimika kata Pj Sekda, senantiasa mendukung keterbukaan informasi sebagai bentuk transparansi dari pemerintah kepada publik

melalui berbagai kanal pemberitaan baik itu website pemerintah, serta pemanfaatan platform sosial media sebagai sarana penyebarluasan informasi.

Sementara saat yang sama, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemkominfo Usman Kansong mengatakan bahwa pengelolaan komunikasi publik harus terus dilakukan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui produksi konten yang sehat dan positif. Salah satu caranya adalah melalui sinergi dan kolaborasi.

"AMC menjadi bentuk apresiasi para mitra yang telah bersama-sama



**Pj Sekda Mimika, Dr Ida Wahyuni, SSTP MEc Dev menerima penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.**

Foto: Bappeda



membangun komunikasi publik melalui informasi yang dikemas dalam pemberitaan atau konten informasi yang mendidik, mencerahkan dan

memberdayakan di seluruh pelosok tanah air," kata Usman.

Pemberian penghargaan dalam AMC 2024 sesuai dengan Surat Keputusan

Dirjen IKP Kementerian Kominfo nomor 17 tentang Penerima Penghargaan Anugerah Media Center Tingkat Nasional Tahun 2024. **(BAPPEDA)**





SD INPRES KOPERAFONIK



**Mimika Membangun**